

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KINERJA

PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautandan Perikanan

Ketua

Dimas Gondomarto Kusuma
Kasubag Tata Usaha

Anggota

Irwan Fakhry
Delima Agustina
Merissa Nur Asih
Riezky Darmawan B.Wijaya
Bagus Hendrajana
Erki Erdian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PSSSDMKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKj ini menguraikan rencana kerja PSSSDMKP beserta analisis capaiannya selama Tahun 2025. Secara umum target kinerja PSSSDMKP yang ditetapkan pada Tahun 2025 telah tercapai semua, hal ini akan menjadi bahan acuan untuk mempertahankan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukannya untuk penyempurnaan laporan ini. Semoga LKj Tahun 2025 ini bermanfaat bagi masyarakat, dan sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai PSSSDMKP dalam meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Jakarta, 20 Januari 2026
Kepala PSSSDMKP



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
I. PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Tujuan	16
1.3 Tugas dan Fungsi	16
1.4 Keragaan SDM	20
1.5 Potensi dan Permasalahan	24
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	25
II. PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	29
2.2 Sasaran Kegiatan	32
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	34
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	35
2.5 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	36
III. AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian NKO dan Sasaran Kegiatan.....	40
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	43
3.3 Akuntabilitas Keuangan PSSSDMKP Tahun 2025.....	72
3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya PSSSDMKP Tahun 2025.....	74
3.5 Capaian Kinerja Lainnya	78
IV. PENUTUP	84
4.1 Capaian Indikator Kinerja.....	84
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	85

LAMPIRAN.....	88
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP (11 agustus 2025)	89
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Revisi 1 (4 Desember 2025)	91
Lampiran 3. Surat Tugas tentang Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun 2025	93
Lampiran 4. Link Bukti Dukung Capaian Kinerja PSSSDMKP	97

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. DASHBOARD KINERJAKU TAHUN 2025 PSSSDMKP	9
GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	19
GAMBAR 3. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDMKP TAHUN 2025.....	20
GAMBAR 4. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDMKP BERDASARKAN GOLONGAN.....	23
GAMBAR 5. DASHBOARD KINERJAKU PSSSDMKP TAHUN 2025.....	41
GAMBAR 6. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 1 SERTIFIKASI KELEMBAGAAN PELATIHAN SESUAI STANDAR LEMBAGA PELATIHAN (LEMBAGA).....	48
GAMBAR 7. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 2 PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL PSSSDMKP (%)	52
GAMBAR 8. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 3 INDEKS PROFESIONALITAS ASN PSSSDMKP (INDEKS)	57
GAMBAR 9. CAPAIAN NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN PSSSDMKP	61
GAMBAR 10. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 4 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI).....	63
GAMBAR 11. CAPAIAN NILAI IKPA PSSSDMKP PER DESEMBER 2025	66
GAMBAR 12. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 5 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI)	68
GAMBAR 13. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 6 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP PSSSDMKP (%)	72
GAMBAR 14. KEGIATAN STANDARDISASI KOMPETENSI SDM KP	80
GAMBAR 15. KEGIATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM KP	82
GAMBAR 16. KEGIATAN PENJAMINAN MUTU DAN KEMITRAAN	83
GAMBAR 17. DASHBOARD KINERJAKU TAHUN 2025 PSSSDMKP	84

DAFTAR TABEL

TABEL 1. KERAGAAN SDM PNS PSSSDMKP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	21
TABEL 2. KERAGAAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN	21
TABEL 3. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDM BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN PADA TAHUN 2025	22
TABEL 4. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDM BERDASARKAN GOLONGAN.....	23
TABEL 5. ANGGARAN BELANJA PSSSDMKP TAHUN 2025	34
TABEL 6. PERUBAHAN ANGGARAN PSSSDMKP	35
TABEL 7. PERJANJIAN KINERJA PSSSDMKP TAHUN 2025	36
TABEL 8. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN& INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025.....	42
TABEL 9. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IK) TAHUN 2025.....	43
TABEL 10. CAPAIAN IK 1 SERTIFIKASI KELEMBAGAAN PELATIHAN SESUAI STANDAR LEMBAGA PELATIHAN (LEMBAGA)	45
TABEL 11. CAPAIAN IK 2 PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL PSSSDMKP (%)	50
TABEL 12. CAPAIAN IK 3 INDEKS PROFESIONALITAS ASN PSSSDMKP (INDEKS).....	54
TABEL 13. PERBANDINGAN CAPAIAN IK 3 SATKER LINTAS K/L LAINNYA	55
TABEL 14. CAPAIAN IK 4 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI)	60
TABEL 15. CAPAIAN NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN	61
TABEL 16. CAPAIAN IK 5 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI)	64
TABEL 17. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	67
TABEL 18. CAPAIAN IK 6 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP PSSSDMKP (%)	69
TABEL 19. REALISASI ANGGARAN PSSSDMKP TAHUN 2025	72
TABEL 20. REALISASI ANGGARAN PER-INDIKATOR KINERJA PSSSDMKP TAHUN 2025	73
TABEL 19. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PER-INDIKATOR KINERJA PSSSDMKP TAHUN 2025	76

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja PSSSDMKP Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2025, PSSSDMKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja (IK). Pengukuran capaian kinerja PSSSDMKP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan capaian kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website, yaitu pada kinerjaku.kkp.go.id.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar 115,30 (ISTIMEWA) sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Tahun 2025 PSSSDMKP

Pada Tahun 2025, dari 6 Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), terdapat 6 IK yang memiliki capaian. Adapun rincian target dan capaian kinerja IK tersebut pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. IK 1 "Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)", dengan target 1 (Lembaga) dan capaian sebesar 3 (Lembaga) dengan persentase capaian sebesar 120%.
2. IK 2 "Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)", dengan target 100% dan capaian sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%.
3. IK 3 "Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)", dengan target 80% dan capaian sebesar 90% dengan persentase capaian sebesar 112,5%.
4. IK 4 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)", dengan target 71,5 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.
5. IK 5 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)", dengan target 92 dan capaian sebesar 89,17 dengan persentase capaian sebesar 96,92%.
6. IK 6 "Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)", dengan target 80 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.

Matriks capaian Indikator Kinerja PSSSDMKP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Capaian				Ket
			Target 2025	Target Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	%	
1	Terselenggara nya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	1	1	3	120,00	
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100	100	100	100,00	
		3 Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	80	80	90	112,50	
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,5	71,5	100	120,00	
		5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92	92	89,17	96,92	
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	80	80	100	120,00	

Warna	Keterangan
	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)
	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6/view/2694/12/2025>

Secara umum capaian kinerja PSSSDMKP pada Tahun 2025 memiliki kategori “Istimewa”. Upaya yang direkomendasikan untuk pencapaian kinerja PSSSDMKP pada triwulan berikutnya yaitu melakukan pemantauan capaian kinerja PSSSDMKP secara berkala

guna memastikan bahwa capaian Indikator Kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran PSSSDMKP pada tahun 2025 sebesar Rp 2.130.063,000 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,775,063,000 serta Belanja Barang sebesar Rp 355,000,000. Realisasi anggaran PSSSDMKP sampai akhir Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 2.065.231.474 (96,96%), yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1.710.304.570 (96,35%) dan belanja barang sebesar Rp 354.926.904 (99,98%). Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Lembaga (Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan) dan Layanan dukungan manajemen internal (layanan hubungan masyarakat dan informasi, layanan umum, layanan data dan informasi, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM, layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi serta layanan manajemen keuangan).

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, dan memberikan dampak serta manfaat dari hasil yang diperoleh.

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja PSSSDMKP atas pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran yang menguraikan dan memuat capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Acuan dalam penyusunan LKj PSSSDMKP Tahun 2025 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 91 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Berdasarkan acuan tersebut, PSSSDMKP berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu Unit Kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, PSSSDMKP pada tahun 2025 telah menetapkan perencanaan kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pengukuran capaian kinerja Tahun 2025, serta menyusun LKj PSSSDMKP Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKj PSSSDMKP Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja PSSSDMKP yang telah dan seharusnya dicapai pada Tahun 2025;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PSSSDMKP untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) hadir sebagai institusi yang memiliki

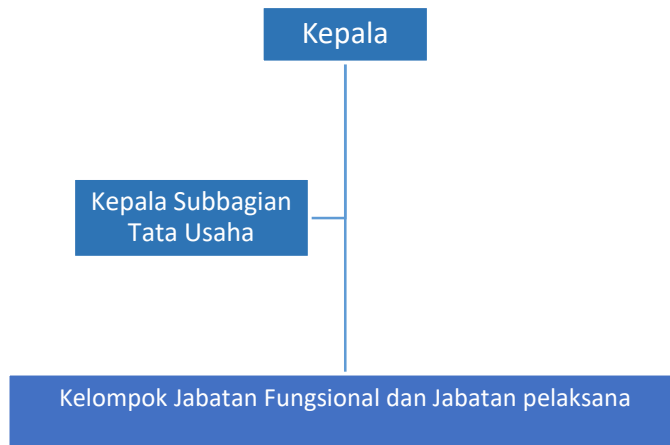
mandat untuk mengembangkan, mengoordinasikan, serta melaksanakan berbagai kebijakan di bidang pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi. Pusat ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan nyata dunia usaha, industri, dan kerja (DUDIKA). Dengan demikian, standar kompetensi yang disusun tidak bersifat normatif semata, tetapi aplikatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar.

Fungsi dari Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan
- b. Penyusunan standar dan kebutuhan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan standar kualifikasi kerja masyarakat kelautan dan perikanan sesuai dengan konvensi internasional dan kebutuhan nasional;
- d. Penyusunan standardisasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- e. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- f. Penyusunan penilaian lembaga instrumen penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan

- g. Pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- h. Pelaksanaan penjaminan mutu kualifikasi kompetensi dan profisiensi masyarakat kelautan dan perikanan
- i. Pelaksanaan pengembangan standar kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- j. Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk pengembangan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan standardisasi dan masyarakat kelautan dan perikanan
- l. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi PSSSDMKP terdiri atas Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tugas dari masing-masing Subbagian serta Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

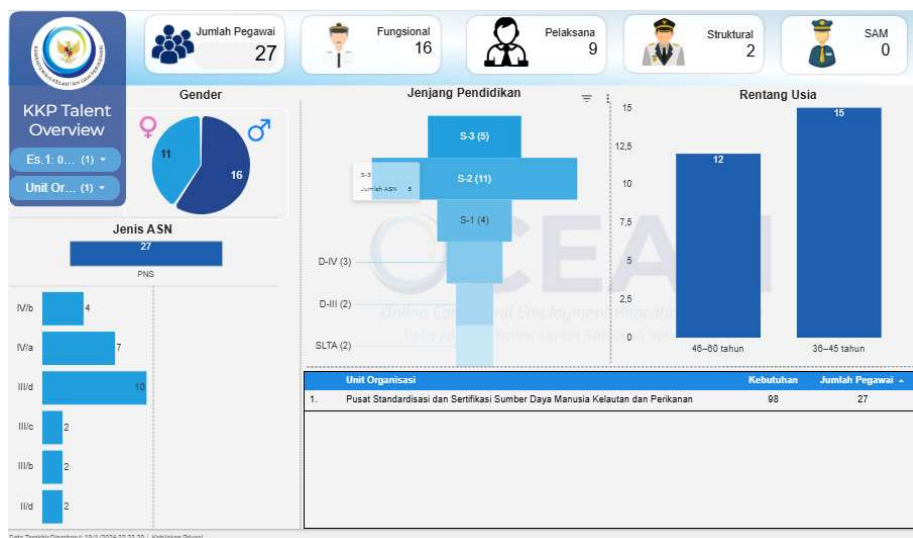
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional, mendukung pelaksanaan kebijakan dan program kerja, menjalankan fungsi administratif, tugas rutin dan berkoordinasi dengan unit kerja lainya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kerja Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

1.4 Keragaan SDM

Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan status kepegawaian disajikan pada Gambar 3.



Sumber: KKP Talent Overview (<https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/57d87f93-9025-4d38-8063-3fe71e2e33cf/page/OcyMEf>)

Gambar 3. Keragaan pegawai PSSSDMKP Tahun 2025

Jumlah pegawai PSSSDMKP sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2025 yaitu 27 pegawai berstatus PNS, yang menjadi tenaga inti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, khususnya terkait perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi di bidang standardisasi dan sertifikasi SDM kelautan dan perikanan.

Tabel 1. Keragaan SDM PNS PSSSDMKP berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	SLTA	DI/D2	D3	D4	S1	S2	S3
Jumlah	2	0	2	3	4	11	5
%	8%	0%	8%	12%	15%	41%	19%

Sumber: Data Portal KKP diolah; 2025

Berdasarkan Pendidikan Pegawai PSSSDM KP sebanyak 5 pegawai berpendidikan S3(19%), 11 pegawai berpendidikan S2 (41%), 4 pegawai berpendidikan S1 (15%), 3 pegawai berpendidikan DIV (12%), 2 Pegawai berpendidikan D3 (8%), dan 2 Pegawai berpendidikan SLTA (8%).

Tabel 2. Keragaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

Pegawai	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah	%
	PNS	PPPK		
Laki laki	11	0	11	41
Perempuan	16	0	16	59

Sumber: Data Portal KKP diolah; 2025

Komposisi pegawai di PSSDMKP menunjukkan keragaman gender, status kepegawaian, dan tingkat pendidikan yang mencerminkan dinamika sumber daya

manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Sumber daya manusia pendukung instansi sebanyak 27 orang pegawai terdiri dari 11 orang laki-laki (41%) dan 16 orang perempuan (59%).

Tabel 3. Keragaan pegawai PSSSDM berdasarkan kelompok jabatan pada Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
I. Struktural		
1	Kepala Pusat	1
2	Kasubag TU	1
II. JF Fungsional		
3	Instruktur Madya	2
4	Perencana Madya	1
5	Pranata Humas Madya	1
6	Perencana Muda	1
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
8	Instruktur Muda	6
9	APK APBN Ahli Muda	1
10	PK APBN Penyelia	1
11	Pranata Komputer Pertama	1
12	PK APBN Terampil	1
III. Pelaksana		
13	Penelaah Teknis Kebijakan	6
14	Pengolah data dan Informasi	2
15	Pengadministrasian Perkantoran	1
Total PNS		27
16	PPPK	0
Total Pegawai		27

Sumber: Data Portal KKP diolah; 2025

Pegawai ASN PSSSDMKP memangku Jabatan Struktural 2 orang (7 %), Fungsional Tertentu/JFT 16 orang (59%) dan Jabatan Fungsional Umum/ JFU 9 orang (33%).

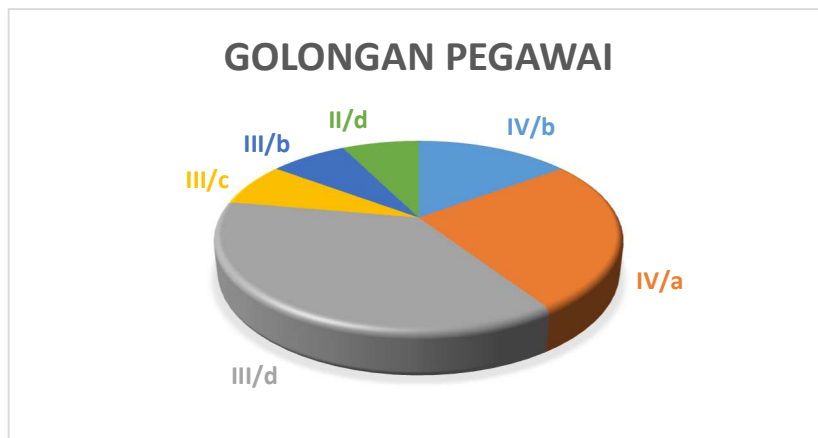
Pegawai PSS SDM KP berdasarkan golongan, terdiri dari IV/b sebanyak 4 orang, IV/a sebanyak 7 orang, III/d sebanyak

10 orang, III/c sebanyak 2 orang, III/b sebanyak 2 orang dan II/d sebanyak 2 orang.

Tabel 4. Keragaan pegawai PSSSDM berdasarkan Golongan

Golongan	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	II/d
Jumlah	4	7	10	2	2	2
%	15%	26 %	37%	7%	7%	7%

Sumber: Data Portal KKP diolah; 2025



Gambar 4. Keragaan pegawai PSSSDMKP berdasarkan golongan.

Salah satu Indikator Kinerja (IK) terkait dengan SDM adalah IP ASN. Capaian IKU IP ASN PSSSDMKP sampai dengan akhir Tahun 2025 yaitu sebesar 90 (Sangat Tinggi) yang dapat diakses melalui website aplikasi IP ASN resmi milik SDMAO/ Portal KKP. Nilai ini sudah melebihi dari target tahunan yang ditetapkan (80).

1.5 Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki oleh PSSSDMKP yaitu:

- a. Memiliki pegawai sebanyak 27 orang berstatus PNS, terdiri dari 5 pegawai berpendidikan S3 (19%), 11 pegawai berpendidikan S2 (41%), 4 pegawai berpendidikan S1 (15%), 3 pegawai berpendidikan DIV (12%), 2 Pegawai berpendidikan D3 (8%), dan 2 Pegawai berpendidikan SLTA (8%).
- b. Tersedianya anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) yang tertuang dalam DIPA PSSSDMKP Tahun 2025 untuk pelaksanaan Program/Kegiatan;
- c. Terjalinnya koordinasi, sinergi antara PSSSDMKP dengan mitra terkait (Unit Kerja lingkup KKP, Kementerian /Lembaga lainnya, Perguruan Tinggi, dll).

Sedangkan permasalahan yang dihadapi PSSSDMKP pada Tahun 2025 yaitu:

- a. Terbatasnya informasi mengenai materi teknis yang akan dimasukkan ke dalam draft rancangan peraturan tentang penerbitan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP
- b. Terbatasnya informasi mengenai data dukung dan format untuk permohonan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP

- c. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM terstandar untuk bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri, asosiasi pelaku usaha, lembaga sertifikasi profesi dalam mengembangkan kebutuhan standard kompetensi kerja.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja PSSSDMKP Tahun 2025, yaitu dengan melakukan perbandingan dan analisis kinerja antara capaian kinerja pada Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025 serta mengindentifikasi factor keberhasilan dan penghambat atas capaian kinerja yang telah dicapai sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan

Berisi gambaran umum tentang PSSSDMKP (tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai) dan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang di hadapi organisasi

2. Bab II – Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis PSSSDMKP 2020-2025, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.

3. Bab IV – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi analisis capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (jika ada);
- c. Menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan/ peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- d. Menganalisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di periode berikutnya yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Berupa Perjanjian Kinerja, Surat Tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja tahun berjalan, link bukti dukung capaian kinerja, atau dokumen pencapaian lainnya.

PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis dalam Trisula Pembangunan. Sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional, sektor ini berkontribusi terhadap upaya penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, peningkatan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 8 persen, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif. Berbagai program strategis akan diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip keberlanjutan.
2. Memperkuat inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Mendorong partisipasi masyarakat pesisir dalam pembangunan ekonomi.

4. Mendukung pencapaian swasembada melalui penguatan sektor perikanan sebagai sumber ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran PSSSDMKP tetap mengacu pada Visi dan Misi KKP. Adapun Visi KKP yaitu Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;

3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”. Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing” dengan indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

BPPSDMKP mempunyai tugas menyelenggarakan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;

- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.2 Sasaran Kegiatan

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program(outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon I. Indikator sasaran program BPPSDM KP mengacu pada Indikator Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029.

1. Sasaran Program (SP 1) Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Sasaran Program (SP 2) Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel BPPSDM KP

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (output) yang dibiayai oleh anggaran (input). Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara specific, measurable, achievable, reliable, and timebond (SMART). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BPPSDM KP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup BPPSDM KP.

Sasaran Kegiatan (SK) terdiri atas 2 yaitu:

Sasaran Kegiatan (SK-1) "Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan" dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Sertifikasi dan Standardisasi SDM KP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga) dengan target sebesar 1;

Sasaran Kegiatan (SK-2) "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP" dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Sertifikasi dan Standardisasi SDM KP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%) dengan target sebesar 100;
2. Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks) dengan target sebesar 80;
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) dengan target sebesar 71,5;
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) dengan target sebesar 92;
5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%) dengan target sebesar 80.

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan PSSSDMKP, tahun 2025 PSSSDMKP mempunyai alokasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM). Adapun perkembangan anggaran sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. Anggaran Belanja PSSSDMKP Tahun 2025

Jenis Belanja	DIPA (11 Agustus 2025)	DIPA (19 November 2025)
Belanja Pegawai	1,598,291,000	1.775.063.000
Belanja Barang	355,000,000	355.000.000
Pagu	1.953.291.000	2.130.063.000

Sumber: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-032.12.1.691629/2025 tanggal 2 Desember 2024 dan SP DIPA-032.12.1.691629/2025 revisi 1 tanggal 19 November 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.1.691629/2025 revisi 1 tanggal 19 November 2025, PSSSDMKP mempunyai pagu anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar 1.953.291.000. Pagu tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1,598,291,000, serta Belanja Barang sebesar Rp 355,000,000. Kemudian berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.1.691629/2025 revisi 1 pada tanggal 19 November 2025 terdapat perubahan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Perubahan anggaran PSSSDMKP

Per Program	DIPA (11 Agustus 2025)	DIPA (19 November 2025)
Program Pendidikan dan vokasi	100.000.000	100.000.000
Program Dukungan Manajemen	1,853,291,000	2.030.063.000
Pagu	1.953.291.000	2,130,063,000

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, telah disusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada tanggal 11 Agustus 2025. Kemudian disusun kembali Perjanjian Kinerja revisi pertama tanggal 4 Desember 2025 yang terdiri atas 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan 6 Indikator Kinerja (IK).

Tabel 7. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100
		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	80
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,5
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	80

Sumber: Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025

2.5 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

a. Rumusan Pengukuran

Pengukuran Capaian Kinerja PSSSDMKP tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja (IK), akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Jenis Indikator pada aplikasi KinerjaJaku dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dimana jika Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dikelompokkan dari alokasi anggarannya, yaitu memakai alokasi anggaran Layanan Dukungan Manajerial. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator Kinerja.

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja PSSSDMKP dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu pada bulan September (B09) dan Desember (B12). Pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran adalah Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: B.378/BBPPSDM.5/KP.440/VIV/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

Tim ini bertugas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja PSSSDMKP Tahun 2025 yang meliputi kegiatan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Keanggotaan Tim terdiri dari Penanggung Jawab yang bertanggung jawab atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2025; Ketua yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2025; dan Anggota yang menyiapkan bahan-bahan dan membantu Ketua dalam penyusunan atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2025.



AKUNTABILITAS KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian NKO dan Sasaran Kegiatan

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini PSSSDMKP telah membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 untuk melaksanakan kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh Sasaran Kegiatan (SK) yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang dikelola oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi *Kinerjaku*, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) PSSSDMKP Tahun 2025 mendapatkan Skor Kinerja sebesar 115,30 dengan status ISTIMEWA, sebagaimana Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku PSSSDMKP Tahun 2025

Capaian Sasaran Kegiatan terdiri atas Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan dengan capaian sebesar 120% dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP dengan capaian sebesar 110,59%

Sasaran Kegiatan (SK 01) terdiri atas capaian kinerja IK 1: Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga), sedangkan Sasaran Kegiatan (SK 02) terdiri atas capaian kinerja IK 2: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%); IK 3: Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks); IK 4: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai); IK 5: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai); IK 6: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%).

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan & Indikator kinerja Tahun 2025

No	Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Target/Capaian				Ket
			Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	
SK.01	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan				120	120	
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Lembaga	1	1	3	120,00	
SK.02	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP				110,59		
2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	%	100	100	100	100,00	
3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	Indeks	80	80	90	112,50	
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	Nilai	71,5	71,5	91,67	120,00	
5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	Niai	92	92	89,37	97,14	
6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	%	80	80	100	120,00	

Sumber: Kinejaku.go.id

Warna

Keterangan

	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)

	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan IK yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan/ sasaran PSSSDMKP.

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui capaian kinerja Tahun 2025 sebanyak 4 (satu) IK yang memiliki capaian dengan nilai 110 - 120 (notifikasi berwarna Biru) dan 2 (dua) IK yang memiliki capaian dengan nilai nilai 90 - <110 (notifikasi berwarna Hijau).

Evaluasi dan analisis kinerja pada Laporan Kinerja Triwulanan menampilkan 5 (lima) poin analisis sesuai dengan

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Berikut analisis capaian kinerja pada setiap Indikator Kinerja.

Sasaran Kegiatan 1 “Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan”

Indikator Kinerja 1

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi dukungan sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan c/q Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor KP. Rekomendasi dukungan sektor kelautan dan perikanan yang dimaksud mencakup lisensi baru untuk Calon LSP, re-lisensi dan penambahan ruang lingkup. Dengan formula perhitungan jumlah rekomendasi dukungan sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala BPPSDM KP atas usulan rekomendasi dari Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP untuk Lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP. Periode pelaporan capaian pada Indikator Kinerja ini adalah Tahunan.

Pada Tahun 2025, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDM KP) telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis khususnya

untuk memastikan bahwa setiap LSP yang mengajukan lisensi, relisensi, maupun penambahan ruang lingkup ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperoleh dukungan sektor yang sah. Surat dukungan tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang ditetapkan BNSP agar LSP dapat diproses secara resmi merujuk pada Pedoman BNSP No. 2 Tahun 2014 tentang Persyaratan Lisensi LSP. Telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Nomor 261 tahun 2025 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Kelautan dan Perikanan.

Tabel 9. Capaian IK 1 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)

IK 1. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)									
Realisasi				2025				Rencana PSSSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	1	3	120	-	11	27,27

Capaian Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga) pada Tahun 2025 sebesar 3 dari target yang ditetapkan sebesar 1 (capaiannya sebesar 120%) dengan rincian sebagai berikut:

1. CLSP Perikanan Indonesia (Lisensi Baru)
2. LSP Kelautan dan Perikanan (Penambahan Ruang Lingkup (17 Skema)

3. LSP Awak Kapal Migran (Penambahan Ruang Lingkup (2 Skema))

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK, adalah :

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta koordinasi yang intensif dengan penanggung jawab IK untuk menyajikan bukti dukung capaian IK yang harus dipenuhi pada setiap triwulan.
2. Telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Nomor 261 tahun 2025 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Kelautan dan Perikanan.
3. Pelaksanaan harmonisasi dengan stakeholders terkait (BNSP dan LSP) terkait komponen materi teknis yang dimasukkan dalam draft rancangan peraturan tentang penerbitan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP

Program/Kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyusunan rancangan peraturan tentang penerbitan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP
2. Sosialisasi mengenai surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP
3. Verifikasi dan validasi dokumen LSP
4. Penerbitan surat rekomendasi dukungan sektor KP

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IK ini antara lain terbatasnya informasi mengenai materi teknis yang akan dimasukkan ke dalam draft rancangan peraturan tentang penerbitan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP. Informasi mengenai data dukung dan format untuk permohonan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP masih terbatas, serta proses pengesahan Surat Rekomendasi dukungan memerlukan koordinasi yang lebih lama dibandingkan dengan norma waktu yang telah ditetapkan. Sehingga perlu adanya harmonisasi dengan stakeholders terkait (BNSP dan LSP) terkait komponen materi teknis yang dimasukkan dalam draft rancangan peraturan tentang penerbitan surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP, harmonisasi dengan LSP terkait data dukung yang diperlukan untuk memperoleh surat rekomendasi dukungan untuk lembaga Sertifikasi Profesi sektor KP serta meningkatkan koordinasi dengan sekretariat Badan dan pihak terkait.

Capaian IK 1 bila dibandingkan dengan Tahun 2024, belum bisa dibandingkan karena merupakan IKU Baru pada tahun 2025 di PSSSDMKP.

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 yaitu sebesar 11, maka capaian pada Tahun 2025 baru sebesar 27,27%.

Anggaran IK ini terdapat pada rincian output Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000 serta realisasi sebesar Rp 99.971.794 (99,97%).



Audiensi terkait dukungan LSP dan komite skema sertifikasi di BNSP



Penyerahan surat dukungan rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi



Bimtek Verifikasi dan Validasi Dokumen Pengajuan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)



Bimtek skema sertifikasi bersama oleh BNSP

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 1 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)

Sasaran Kegiatan 2 “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP”

Indikator Kinerja 2

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Capaian kinerja IK ini pada Tahun 2025 diukur menggunakan periode pengukuran triwulanan. Layanan dukungan manajemen internal PSSSDMKP terdiri dari:

1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
2. Layanan Data dan Informasi
3. Layanan Perkantoran
4. Layanan Umum

Formula pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan dengan Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan sebagai Persentase layanan dukungan manajemen internal.

Tabel 10. Capaian IK 2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

IK 2. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)									
Realisasi				2025				Rencana PSSSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	100	100	100	-	100	100

Capaian persentase layanan dukungan manajemen Internal PSSSDMKP pada Tahun 2025 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% (capaiannya sebesar 100%).

Bukti capaian IK 2 bila dibandingkan dengan Tahun 2024, belum bisa dibandingkan karena merupakan IKU baru pada PSSSDMKP. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 100, maka capaian pada tahun 2025 bernilai sama.

Apabila dibandingkan dengan Satker lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis yaitu Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) dengan target tahunan sebesar 100%, dan memiliki capaian yang sama sebesar 100%.

Capaian kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi Tugas dan Fungsi PSSSDMKP
2. Penyebaran Informasi Konten Media Sosial
3. Publikasi Narasi digital tematik mingguan
4. Optimalisasi kanal media sosial
5. Pengelolaan Repositori Cloud KKP

6. Migrasi Layanan Akses Internet di PSSSDMKP
7. Pemetaan Kebutuhan Akses Internet Sebelum Migrasi di PSSSDMKP
8. Pembayaran gaji tunjangan dan uang makan pegawai PSSSDMKP
9. Pembayaran operasional perkantoran.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK, adalah:

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta koordinasi yang intensif dengan penanggung jawab IK untuk menyajikan bukti dukung capaian IK yang harus dipenuhi pada akhir tahun.
2. Tidak terlalu besarnya anggaran layanan dukungan manajemen Internal PSSSDMKP sehingga relatif mudah dalam merealisasikanya.
3. Kedisiplinan Sekretariat Badan dalam menjalankan jadwal di masing masing bidang.

Program/Kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- 1) Penyusunan Laporan Analisa Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP.
- 2) Rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan PSSSDMKP.
- 3) Koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan: “Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi”, “Layanan Data dan Informasi” serta “Layanan Perkantoran”: 1) Gaji dan Tunjangan, 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp1.986.063.000 serta realisasi sebesar Rp 1.921.275.761 (96,74%).



Pelaksanaan apel pagi dan koordinasi internal kegiatan lingkup PSSSDMKP



Rapat Koordinasi internal terkait penyelesaian kegiatan Tahun 2025 dan Persiapan kegiatan Tahun 2026 Lingkup PSSSDMKP



Penyusunan refleksi capaian kinerja 2025 dan outlook 2026 lingkup PSSSDMKP



Rapat Persiapan dan Pengukuran Realisasi TW III PSSSDMKP

Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

Indikator Kinerja 3

Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)

IK Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada ketentuan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, profesionalitas didefinisikan sebagai kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugaspekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Lebih lanjut, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Dimensi Kualifikasi, yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi, untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang

pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;

3. Dimensi Kinerja, yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN; serta
4. Dimensi Disiplin, untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima ASN.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks) diukur menggunakan periode pelaporan semesteran.

Tabel 11. Capaian IK 3 Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)

IK 3. Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)									
Realisasi				2025				Rencana Strategis BPPSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	80	90	112,50	0	83	108,43

Capaian IK 3 Pada Tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target IP ASN 80 (indeks) dan capaian sebesar 90 (indeks) dengan persentase capaian sebesar 112,50 %.

Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDMKP Nomor 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026 tanggal 6 Januari 2026

tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IPASN Tahun 2025 lingkup BPPSDM. Progres Capaian Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP sebesar 90 (tinggi), sesuai dengan website <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn/2025/>.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis Pusat Penyuluhan KP, PSSSDMKP memiliki nilai lebih tinggi. Adapun rincian capaian perkomponen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian IK 3 Satker Lintas K/L Lainnya

Nama Satker	Capaian Per Komponen IK IP ASN					Ket
	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Total	
PSSSDMKP	97,04%	83,32%	91,37%	100%	90	Tinggi
Pusluh KP	92,56%	85,9%	81,77%	100%	87,03	Tinggl

Sumber: Data Portal KKP di olah Tahun 2025

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 yaitu sebesar 83, maka capaian pada Tahun 2025 sudah melebihi target sebesar 108,43%.

Progres kegiatan sampai dengan tahun 2025 antara lain:

1. Memberikan informasi dan dorongan kepada pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh instansi baik lingkup KKP maupun K/L lainnya dan dibuktikan dengan data dukung berupa sertifikat yang diinput ke; <https://myasn.bkn.go.id/dashboard>

2. Menyusun dan/ atau melakukan upload file ke dalam tautan yang telah ditentukan terkait kualifikasi, kompetensi dan disiplin pegawai;
3. Berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait kualifikasi pendidikan IP ASN.
4. Melakukan koordinasi, verifikasi dan validasi terkait data dukung capaian yang diinput ke masing-masing SKP pegawai.
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian IP ASN masing-masing pegawai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK, adalah :

1. Menyampaikan kewajiban peningkatan IP ASN kepada setiap pegawai melalui apel pagi.
2. Melakukan penilaian kinerja pegawai pada setiap Triwulan dan penilaian Final menggunakan aplikasi Kinerja BKN; dan
3. Menjadikan IP ASN sebagai salah satu Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi setiap pegawai.

Program/Kegiatan untuk mendukung kegiatan:

1. Mendorong kualitas SDM melalui keikutsertaan berbagai Pelatihan, Diklat, dan seminar-seminar yang relevan;
2. Pemutakhiran data terkait riwayat pendidikan, pelatihan, seminar, dan workshop yang pernah diikuti oleh pegawai melalui aplikasi myASN secara berkala.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan Manajerial “Layanan Manajemen SDM: 1) Pelayanan Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur BPPSDMKP;
2) Pelayanan Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan
SDM Aparatur" dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000
serta realisasi sebesar Rp 5,989,501 (99,83%).



Ket: Kegiatan apel pagi pegawai
lingkup PSSSDMKP



Ket: Rapat Koordinasi internal bidang
kepegawaian



Ket: Pengisian SKP Pegawai PSSSDMKP



Ket: Rapat PUG lingkup BPPSDMKP

Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 3 Indeks
Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)

Indikator Kinerja 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya

- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90 ;
 - b. Baik, apabila NKA $>80 - 90$;
 - c. Cukup, apabila NKA $>60 - 80$;
 - d. Kurang, apabila NKA $>50 - 60$;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) menggunakan periode pelaporan tahunan.

Tabel 13. Capaian IK 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

IK 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)									
Realisasi				2025				Rencana Strategis BPPSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	71,50	100	120	0	82,50	121,21

Capaian kinerja IK 4 pada pada Tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target 71,5 dan capaian 100 dengan persentase capaian sebesar 120% . Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, belum bisa dihitung karena merupakan IKU baru. Jika dibandingkan dengan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan capaian NKPA 100, maka nilai NKPA PSSSDMKP memiliki capaian yang sama.

Bukti capaian IKU ini sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tentang Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2026. Serta capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dapat dilihat pada aplikasi monev kemenkeu <https://monev.kemenkeu.go.id/>.

Tabel 14. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

MONEV PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Role: Pilih TA (2025) Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan 10 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.32.00100	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-01-06 09:15:29

Sumber: Data OMSPAN dan SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2025



Sumber: Data OMSPAN dan SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2025

Gambar 9. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP adalah:

- 1) Komitmen pimpinan serta penanggung jawab IK untuk mengawal tercapainya target IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP

- 2) Kemudahan monitoring informasi terkait komponen Nilai SMART yang terangkum dalam aplikasi SMART DJA <https://monev.kemenkeu.go.id/>, yang terkoneksi dengan aplikasi SAKTI <https://sakti.kemenkeu.go.id/>
- 3) Penyusunan revisi anggaran serta halaman III DIPA;
- 4) Melakukan konsultasi dengan pengelola anggaran BPPSDM KP
- 5) Menghadiri pertemuan terkait efisiensi anggaran secara daring dengan BPPSDM KP terkait update ketentuan efisiensi anggaran.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian IK ini diantaranya :

1. Melakukan penyerapan anggaran yang konsisten dengan DIPA.
2. Melakukan penginputan capaian output di setiap awal bulan pada aplikasi SAKTI yang akan otomatis terinput ke dalam aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/>.
3. Mengunggah dokumen-dokumen perencanaan ke dalam website <https://esr.menpan.go.id/>, seperti PK, Manual IKU, Rencana Aksi, Rincian Target IKU Tahun 2025.
4. Penginputan capaian kinerja Triwulan dan Tahun 2025 ke dalam aplikasi Kinerja KKP melalui link kinerjaku.kkp.go.id/.
5. Pengunggahan data dukung capaian pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja Tahun 2025.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Layanan Perencanaan dan Penganggaran” dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan pagu anggaran sebesar Rp12.000.000 serta realisasi sebesar Rp 11.995.952 (99,97%).



Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran BPPSDMKP



Rapat pimpinan, koordinasi Perencanaan lingkup BPPSDMKP



Rapat koordinasi Internal Pembahasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2025 lingkup PSSSDMKP



Rapat penyusunan prognosa capaian kinerja level I dan level II lingkup BPPSDM Tahun 2025

Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga atas kesesuaian terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Tabel 15. Capaian IK 5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

IK 5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)									
Realisasi				2025				Rencana Strategis BPPSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	92	89,17	96,92	0	92,2	96,71

Capaian kinerja IK 5 pada Tahun 2025, dengan target 92,00 terdapat capaian 89,17 dengan persentase 96,92%. Capaian IKPA PSSSDMKP terjadi deviasi cukup besar antara RPD dengan penyerapan anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, belum bisa dihitung karena merupakan IKU baru. Jika dibandingkan dengan satker lain seperti Pusat Penyuluhan KP dengan capaian sebesar 95,73, nilai ini lebih tinggi dibandingkan capaian IKPA PSSSDMKP.

Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP- Biro Keuangan Nomor: 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025.

Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian IK ini yaitu monitoring perkembangan IKPA setiap triwulan, Penyusunan RPD, menjaga penyerapan anggaran sesuai dengan RPD yang telah disusun sehingga deviasi menjadi semakin kecil serta adanya komitmen pimpinan untuk mengawal tercapainya nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah:

1. Monitoring perkembangan IKPA setiap Triwulan,
2. Penyusunan RPD, menjaga penyerapan anggaran sesuai dengan RPD yang telah disusun,
3. Penginputan capaian output di setiap awal bulan pada aplikasi SAKTI serta ,
4. Melakukan koordinasi antara pimpinan dengan ketua tim kerja, dan penanggung kerja kegiatan.



Sumber: Data OMSPAN dan SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2025

Gambar 11. Capaian Nilai IKPA PSSSDMKP per Desember 2025

Tabel capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP berdasarkan omspan, sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	032	601629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.53	61.97	100.00	100.00	100.00	100.00	89.17	100%	0.00	89.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.78	12.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.27			90.49			100.00				

Sumber: Data OMSPAN dan SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2025

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan "Layanan Manajemen Keuangan" dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.000.000 serta telah direalisasikan sebesar Rp 5.998.968 (99,98%).



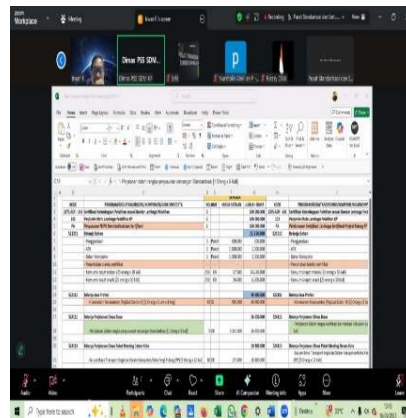
Ket: Rapat percepatan langkah angkah akhir tahun 2025 lingkup BPPSDMKP



Ket: Rapat Koordinasi dengan KPPN Jakarta VI terkait pemantauan penyerapan anggaran dan deviasi halaman III DIPA



Ket: Rapat Monitoring belanja kontraktual lingkup BPPSDMKP



Ket: Rapat terkait revisi POK pda aplikasi sakti

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator Kinerja 6

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\text{Persentase RU PBJ yang diumumkan} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Capaian kinerja IK 6 pada Tahun 2025 diukur menggunakan periode pengukuran triwulanan.

Tabel 17. Capaian IK 6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)

IK 6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)									
Realisasi				2025				Rencana Strategis BPPSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	80	100	120	-	84	119,05

Capaian kinerja IK 6 persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP, dari target 80 dengan capaian sebesar 100, persentase

capaian sebesar 120%, sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP No 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025.

Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%) tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan IK baru. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 84, maka capaian pada Tahun 2025 sudah melebihi target sebesar 119,05.

Apabila dibandingkan dengan satker Lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis yaitu Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan target yang sama (80), dan memiliki capaian yang sama (100) dengan persentase capaian 120%.

Capaian IK 6 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini yaitu:

1. Kecepatan dalam mengurus permintaan user password pada aplikasi SIRUP.
2. Adanya komitmen yang tinggi dari Kepala PSSSDMKP dan penanggung jawab IK untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan serta penyedia agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian IK ini diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan serta penyedia agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku,
2. Melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Layanan Umum: Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Pelatihan” dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000 serta realisasi sebesar Rp 19.999.498 (100%).



Ket: Diseminasi Pencatatan Rencana Umum Pengadaan TA 2026 Lingkup KKP

Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)

3.3 Akuntabilitas Keuangan PSSSDMKP Tahun 2025

Realisasi anggaran PSSSDMKP sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp 2.130.063.000 (96,96%). Realisasi anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Anggaran PSSSDMKP Tahun 2025

No	Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1,775,063,000	1,710,304,570	96,35
2	Belanja Barang	355,000,000	354,926,904	99,98
Jumlah				

Sumber: Data OMSPAN dan SAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan akhir Tahun 2025

Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1.710.304.570 (96,35%) dan belanja barang sebesar Rp 354.926.904 (99,98%). Anggaran pada belanja pegawai digunakan untuk keperluan belanja pegawai yaitu untuk

membiayai pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PSSSDMKP, serta belanja barang digunakan untuk membiayai dukungan layanan manajemen PSSSDMKP.

Sasaran Kegiatan 1 yaitu Sasaran Kegiatan “ Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan ”, memiliki pagu anggaran sebesar Rp100.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 99.971.794 (99,97%).

Sasaran Kegiatan 2 yaitu Sasaran Kegiatan “ Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP ”, memiliki pagu anggaran sebesar Rp 2.030.063.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1,965,259,680 (96,81%).

Selanjutnya, realisasi anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025 disajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	100.000.000	99.971.794	99,97
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	1.986.063.000	1.921.275.761	96,74

		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	6.000.000	5.989.501	99,83
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	12.000.000	11.995.952	99,97
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	6.000.000	5.998.968	99,98
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	20.000.000	19.999.498	100
			Total	2.130.063.000	2.065.231.474	96,96

Sumber: Data OMSPAN dan SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2025

Upaya pencapaian kinerja PSSSDMKP pada Tahun 2025 telah dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya PSSSDMKP Tahun 2025

- Analisis Efisiensi Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja

anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi anggaran PSSSDMKP Tahun 2025 adalah sebesar 96,96%. Efisiensi tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan PSSSDMKP melalui koordinasi dan integrasi antara Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator bidang, dan komitmen bersama seluruh pegawai untuk terus berbenah diri dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Efisiensi penggunaan Anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP Tahun 2025

N O	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINER JAKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %	EFISIENSI (%)
1	Terselenggara nya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	120	100.000.000	99.971.794	99,97	20,03
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100	1.986.063.000	1.921.275.761	96,74	3,26
		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	112,50	6.000.000	5.989.501	99,83	12,67
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	120	12.000.000	11.995.952	99,97	20,03
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	96,92	6.000.000	5.998.968	99,98	-3,06
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	120	20.000.000	19.999.498	100	20
			Total	115,30	2.130.063.000	2.065.231.474	96,96	18,34

Sumber: Diolah dari Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan , Desember 2025

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan efisiensi ke depan sbb:

1. Melakukan perhitungan kembali secara detil kebutuhan per belanja, khususnya belanja pegawai sebagai proporsi anggaran terbesar agar cukup sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu proporsi anggaran BPPSDM untuk berkinerja;
2. Mencantumkan output kegiatan yang sekiranya sudah dapat diperoleh (khususnya pada RO dengan satuan Layanan) sehingga nilai efisiensi dari sasaran program pada NKA tidak tercatat minus sepanjang tahun (tidak berkinerja);
3. Melakukan pengecekan kembali informasi indikator kinerja pada aplikasi Monev kemenkeu untuk memastikan indikator dan target volume yang diinput tersaji dengan baik; dan
4. Melakukan pengawalan penyajian data kinerja yang update dan valid melalui kegiatan rekonsiliasi kinerja data NKA dan capaian output SAKTI secara berkala untuk menjaga nilai konsistensi capaian kinerja anggaran, dan melaporkan capaian output secara tepat waktu pada aplikasi SAKTI dan OMSPAN;
5. Meminimalisir terjadinya anomali data capaian output pada saat pengisian data di aplikasi SAKTI.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

Disamping capaian indikator kinerja yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan antara lain:

A. **STANDARDISASI KOMPETENSI SDM KP**

- 1) Penyusunan RSKKNI Pengembangbiakan Karang Hias
 - a) Prakonvensi
 - b) Verifikasi Eksternal dengan Kementerian Ketenagakerjaan
 - c) Perbaikan atas Pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) Hasil Verifikasi Eksternal
 - d) Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Pengembangbiakan Karang Hias
- 2) Penyusunan RSKKNI Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di Wilayah Perairan Laut
 - a) Pembentukan Tim Perumus
 - b) Penyusunan Peta Kompetensi RSKKNI Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - c) Penyusunan Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja RSKKNI Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- 3) RSKKNI Bidang Penyuluhan Perikanan
 - a) Pembentukan Tim Perumus

- b) Penyusunan Peta Kompetensi RSKKNI Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - c) Penyusunan Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja RSKKNI Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- 4) Penyusunan KKNi Konservasi Laut
Harmonisasi Penyusunan KKNi Konservasi Laut
- 5) Peraturan Menteri KP No. 16 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan
- 6) Keputusan Menteri KP Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmen KP No. 65 Tahun 2025 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.
- 7) Rencana aksi giat komite standar :
 - a) Sosialisasi RIP dan Konsolidasi antara pengarah, Ketua dan anggota komite untuk evaluasi SKKNI yang ada pd sektor KP.
 - b) Rencana pengusulan pencabutan SKKNI (Evaluasi 3 SKKNI terbitan tahun 2025, laporan ANEV dan Rencana Pengusulan Pencabutan ke Kemenaker)



Kegiatan konvensi SKKNI karang hias laut; 3-4 November 2025



Rapat Pemberlakuan Pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); 11 desember 2025



Ket: Rapat penyusunan Peta Kompetensi bidang EAFM Laut; 29 September 2025



Rapat Penyusunan refleksi capaian kinerja bidang Standardisasi 2025 lingkup PSSSDMKP; 10 Desember 2025

Gambar 14. Kegiatan Standardisasi Kompetensi SDM KP

B. SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM KP

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sertifikasi Kompetensi SDM KP adalah:

1. Sertifikasi keahlian Awak Kapal Perikanan periode agustus sampai 30 Desember 2025, sebanyak 585 orang

Awak Kapal Perikanan yang tersebar pada 512 PUKAKP Wil VI dan 73 PUKAKP Wil XI, sertifikat yang telah diterbitkan terdiri dari Ankapin sebanyak 303 orang, Atkapin 135 Orang dan Pembaruan sebanyak 147 orang (Ankapin 18 orang dan Atkapin 29 orang).

2. Rancangan Skema Kompetensi Non Awak Kapal Perikanan
3. Telah dilakukan revisi dan penerbitan peraturan tentang :
 - a. Pengelola Sertifikasi Awak Kapal Perikanan (Kepka BPPSDM No 259 Tahun 2024 tentang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan)
 - b. Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (Kepka BPPSDM No 260 Tahun 2025 tentang Pengelola Sertifikasi Awak Kapal Perikanan)
 - c. Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan (Kepka DPKAKP No 002 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan)
4. Pembahasan penyandingan kurikulum di Satuan Pendidikan dengan Unit Kompetensi.
5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi AKP dengan DPKAKP dan PUKAKP



Gambar 15. Kegiatan sertifikasi kompetensi SDM KP

C. PENJAMINAN MUTU DAN KEMITRAAN

Kegiatan telah dilaksanakan adalah: Penyusunan rancangan metadata;

- 1) Sertifikasi Kompetensi SDM KP Menurut Bidang Keahlian dan Jenis Kelamin
- 2) Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor KP menurut Jenis LSP dan Bidang Usaha

- 3) Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sertifikasi KP menurut LSP dan Bidang Usaha
- 4) Asesor Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor KP menurut Bidang Keahlian
- 5) Standard Kompetensi Sektor KP menurut kategori SKKNI, SK3 dan SKI



Gambar 16. Kegiatan Penjaminan Mutu dan Kemitraan

IV. PENUTUP

4.1 Capaian Indikator Kinerja

Laporan PSSSDMKP Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PSSSDMKP, serta sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025, PSSSDMKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja.

Secara umum, capaian kinerja PSSSDMKP menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar 115,30 (ISTIMEWA) sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Gambar 17. Dashboard Kinerjaku Tahun 2025 PSSSDMKP

Capaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran PSSSDMKP dalam meningkatkan kualitas layanan internal, mendukung efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum target-target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2025 telah tercapai dan dalam kategori "Istimewa". Dalam prosesnya terdapat permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Tahun 2025, yaitu pada IK 5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)", dengan target 92 dan capaian sebesar 89,17 dengan persentase capaian sebesar 96,92% capaian ini masih belum memenuhi target, karena terjadi deviasi cukup besar antara RPD dengan penyerapan anggaran.

Upaya yang direkomendasikan untuk pencapaian kinerja PSSSDMKP ke depan antara lain:

- a. Untuk mencapai target IKPA, diperlukan penyusunan RPD untuk setiap Rincian Output.
- b. Monitoring penyerapan anggaran secara berkala
- c. Monitoring perkembangan IKPA setiap Triwulan pada tahun berjalan
- d. Melakukan monitoring setiap triwulan pada Indikator Kinerja, guna memastikan bahwa capaian Indikator Kinerja

dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja serta menjadikan capaian kinerja triwulan ini sebagai acuan untuk mempertahankan capaian di tahun berikutnya.

Laporan kinerja (LKj) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja PSSSDMKP pada Tahun berikutnya.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP (11 agustus 2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpsdmi@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani**
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

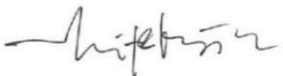
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100
		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	80
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,5
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	100.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.853.291.000
Total Anggaran PSSSDMKP Tahun 2025		1.953.291.000

Jakarta, W Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Revisi 1(4 Desember 2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani**
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100
		3	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)	80
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,5
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	100.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2.030.063.000
Total Anggaran PSSSDMKP Tahun 2025		2.130.063.000

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lampiran 3. Surat Tugas tentang Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B. 378/BPPSDM .5/KP.440/VIII/2025

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Satker Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor SP DIPA-032.12.1.691629/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Kinerja Organisasi
 - a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Perjanjian Kinerja, Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, dan Manual Indikator Kinerja Utama lingkup Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP;
 - b. Memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja diunggah dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - c. Melaksanakan pengukuran capaian indikator kinerja organisasi dan rencana aksi secara berkala;
 - d. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian indikator kinerja organisasi dan rencana aksi diunggah ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - e. Menyusun laporan kinerja (LKj) secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- (bulanan/triwulanan/semester/tahunan);
- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu, dan diunggah ke dalam website resmi;
 - i. Menyiapkan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP; dan
 - j. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelolaan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terkait pengelolaan kinerja organisasi.
2. Tim Pengelola Kinerja Pegawai
- a. Melakukan sosialisasi pengisian SKP yang telah terintegrasi dengan angka kredit bagi yang telah menduduki jabatan fungsional;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan SKP pegawai secara triwulanan dan tahunan;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap pengisian rencana aksi, bukti dukung, dan hasil kinerja pegawai triwulanan dan tahunan; dan
 - d. Melakukan penyelesaian laporan SKP pegawai dan pimpinan triwulanan dan tahunan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Jakarta, 28 Agustus 2025
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Tim Pengelola Kinerja Organisasi
 Nomor : B. 378/BPPSDM.5/KP.440/VIII/2025
 Tanggal : 28 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
 PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dimas Gondomarto Kusuma, S.E., M.AP.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2	Bagus Hendrajana, S.T., M.Sc.	Pranata Humas Ahli Madya
3	Irwan Fakhry, S.Pi.	Perencana Madya
4	Fairdiana Andayani, S.St.Pi.	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Delima Agustina, S.St.Pi.	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Anisa Fathir Rahman, S.Pi	Pranata Keuangan APBN Penyelia
7	Franciscus Edi Priyono, S.Pi	PPNPN/Anggota Pelaksanaan layanan kehumasan
8	Ade Kurniawati	PPNPN/Anggota Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi SDM KP

Kepala Pusat Standardisasi dan
 Sertifikasi Sumber Daya Manusia
 Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
 Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II Tim Pengelola Kinerja Pegawai
 Nomor : B. 378/BPPSDM.5/KP.440/VIII/2025
 Tanggal : 28 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI
 PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dimas Gondomarto Kusuma, S.E, M.AP.	Kepala Sub bagian Tata Usaha
2	Bagus Hendrajana, S.T., M.Sc.	Pranata Humas Ahli Madya
3	Irwan Fakhry, S.Pi.	Perencana Ahli Madya
4	Merissa Nur Asih, S.I.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Ade Fitri Amalia, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi

Kepala Pusat Standardisasi dan
 Sertifikasi Sumber Daya Manusia
 Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
 Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 4. Link Bukti Dukung Capaian Kinerja PSSSDMKP

https://bit.ly/Pengukuran_PSSSDMKP_TWIV_2025



@bppsdm_pusatsskp



@bppsdm_pusatss

PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara